

Analisis Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai dalam Mengurangi Kemiskinan di Pedesaan

Author:

Salsha Awalia¹, Siti Azzahra Sumayya²

Affiliation:

Universitas Primagraha¹

Jl. Trip Jamaksari Nomor 1A Blok A1 Kaligandu Kec. Serang, Kota Serang Banten, 42111

Universitas Pendidikan Indonesia²

Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Jawa Barat - Indonesia

Email :

salsha.awalia@gmail.com¹, zahrasumayya31@gmail.com²

Abstract

BLT is defined as assistance for the poor that is sourced from village funds. This assistance is one type of social protection and security from the government. BLT aims to help the poor meet their basic needs, especially in situations of economic crisis such as the COVID-19 pandemic. Although BLT increases the purchasing power of the poor, its impact is temporary and insufficient to address long-term structural poverty. The study used qualitative and quantitative approaches to analyze the effectiveness of the program and constraints in its implementation. Results show that BLT contributes to reducing poverty temporarily, but does not create economic independence among recipients.

Keywords: Direct Cash Transfer, poverty, rural, effectiveness, government policy.

Abstrak

BLT didefinisikan sebagai bantuan untuk penduduk miskin yang bersumberkan dari dana desa. Bantuan ini merupakan salah satu jenis perlindungan dan jaminan sosial dari pemerintah. BLT bertujuan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar, terutama dalam situasi krisis ekonomi seperti pandemi COVID-19. Meskipun BLT meningkatkan daya beli masyarakat miskin, dampaknya bersifat sementara dan tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan struktural jangka panjang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menganalisis efektivitas program dan kendala dalam implementasinya. Hasil menunjukkan bahwa BLT berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan sementara, tetapi tidak menciptakan kemandirian ekonomi di kalangan penerima.

Kata Kunci: Bantuan Langsung Tunai, kemiskinan, pedesaan, efektivitas, kebijakan pemerintah.

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah sosial yang masih belum terselesaikan di negara berkembang khususnya Indonesia, terutama di daerah pedesaan, masih menjadi masalah sosial dan ekonomi yang

signifikan. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah melalui program Bantuan Langsung Tunai, yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar (Akib, Risfaisal 2015). Bantuan Langsung Tunai Dimana biasa disingkat dengan BLT, dalam pasal 1 Angka 28 Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 BLT didefinisikan sebagai bantuan untuk penduduk miskin yang bersumberkan dari dana desa. Bantuan ini merupakan salah satu jenis perlindungan dan jaminan sosial dari pemerintah. Definisi dalam rencana Pembangunan nasional dalam (Yohandarwati et al. 2003) perlindungan dan jaminan dapat dijelaskan sebagai:

“..suatu Tindakan kebijakan yang dijalankan untuk memberi perlindungan dan rasa aman untuk masyarakat miskin, utamanya bagi kelompok masyarakat yang miskin sekali (the poorest) dan kelompok masyarakat miskin (the poor)”

Pemerintah memperkenalkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005 (Izzati et.al.,2020). BLT sering diberikan sebagai respons terhadap situasi krisis ekonomi, seperti kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) atau pandemi COVID-19 (Dewi, Andrianus 2021). Pandemi COVID-19 telah berdampak kepada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara melalui pembiayaan (Aseh, Gafar & Zamhasari 2021). Meskipun Program BLT telah diterapkan secara luas, efektivitasnya dalam menurunkan tingkat kemiskinan di pedesaan masih perlu diteliti lebih dalam. Beberapa studi menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat melalui BLT, namun ada pula yang menunjukkan bahwa dampak BLT hanya bersifat sementara. Mengidentifikasi faktor – faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan program ini penting untuk kebijakan pembangunan yang lebih efektif. Bantuan Langsung Tunai memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin terutama pemenuhan kebutuhannya (Ade Taufan 2022).

BLT (Bantuan Langsung Tunai) sering kali difokuskan pada daerah pedesaan karena jumlah alasan strategi dan kebutuhan yang mendasar, dilihat dari kondisi ekonomi yang rentan, tingkat kemiskinan di pedesaan umumnya lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Banyak penduduk pedesaan bergantung pada sektor pertanian atau pekerjaan informal dengan pendapatan tidak tetap. Penduduk pedesaan sering memiliki akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi seperti pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan yang memadai.

Gap penelitian ini terletak pada penggabungan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas BLT, dengan pendekatan penelitian jangka panjang untuk mengevaluasi dampak berkelanjutan terhadap kemiskinan. Penelitian ini juga menitikberatkan pada studi kasus spesifik di wilayah pedesaan tertentu dengan mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi lokal. Serta mengumpulkan data di tingkat rumah tangga untuk mengeksplorasi dampak langsung dan tidak langsung BLT.

(Lihardi, RFS 2021), efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu Lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas – tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun tujuan utama dari penelitian ini untuk menganalisis efektivitas Program BLT dalam mengurangi tingkat kemiskinan di daerah pedesaan. Mengidentifikasi kendala yang muncul dalam implementasi program. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan BLT agar lebih efektif dan berkelanjutan (Sofi 2021).

Penelitian terkait BLT telah banyak dilakukan, salah satunya dilakukan oleh (Aji 2010). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang dampak BLT terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki desain program bantuan sosial di masa mendatang. Jumlah pengeluaran pemerintahan pada BLT-Dana Desa adalah Rp 600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan berikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp 300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak sehingga program Bantuan Langsung Tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Dewi, Andrianus 2021).

Relevansi langsung terhadap kebijakan pemerintah, terutama dalam konteks upaya penganggulangan kemiskinan, ada beberapa relevansi penelitian terhadap kebijakan yang sedang berjalan :

- Dukungan terhadap Kebijakan Sosial dan Ekonomi
Pemenuhan Kebutuhan Dasar : BLT adalah bagian dari kebijakan perlindungan sosial untuk memastikan bahwa masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan dasar, terutama dalam situasi krisis. Penelitian ini memberikan data empirik apakah kebijakan tersebut benar-benar efektif.
Fokus pada Pedesaan: Pedesaan adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibanding perkotaan. Penelitian ini relevan untuk mengevaluasi apakah alokasi BLT di daerah pedesaan sudah optimal.
- Evaluasi Program Bantuan Sosial
Efektivitas BLT : Kebijakan BLT sering kali dipertanyakan efektivitasnya dalam menurunkan kemiskinan secara dampak jangka pendek dan jangka panjang dari BLT.
Targeting Penerima Bantuan : Penelitian ini relevan untuk menganalisis apakah program BLT tepat sasaran, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki kerentanan tinggi terhadap salah sasaran akibat keterbatasan data.
- Penyempurnaan Sistem Distribusi
Efisiensi Penyaluran : Penelitian ini dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kendala dalam proses distribusi BLT, seperti keterlambatan atau ketimpangan. Hal ini relevan untuk meningkatkan efisiensi sistem distribusi bantuan.

Penggunaan Teknologi : Dengan berkembangnya sistem digital, penelitian ini dapat memberikan wawasan apakah teknologi seperti *e-wallet* atau transfer bank sudah efektif diterapkan di pedesaan.

- Relevansi terhadap Kebijakan Pemulihan Ekonomi

Dampak Pandemi COVID-19 : Dalam masa pandemi, BLT menjadi salah satu instrumen utama menjaga daya beli masyarakat miskin. Penelitian ini relevan untuk menilai sejauh mana BLT membantu pemulihan ekonomi di pedesaan.

Pemberdayaan Ekonomi Desa : Penelitian ini juga dapat memberikan masukan apakah BLT cukup efektif sebagai program mandiri atau perlu dikombinasikan dengan kebijakan lain, seperti Dana Desa atau program pemberdayaan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (atau kuantitatif, jika relevan) untuk menganalisis efektivitas program BLT. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pandangan dan pengalaman penerima BLT di pedesaan (Hasyim, Prastyawan & Haryono 2024). Jika kuantitatif digunakan, pendekatan statistik akan membantu mengukur dampak BLT terhadap tingkat kemiskinan secara numerik. Jenis penelitiannya Deskriptif-analitis : Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan situasi yang ada terkait pelaksanaan program BLT dan menganalisis efektivitasnya dalam mengurangi kemiskinan. Jika kuantitatif, bisa menggunakan metode survei untuk mendapatkan data numerik tentang penerima manfaat BLT.

Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara Mendalam : Wawancara dilakukan kepada penerima BLT, aparat desa, dan pejabat yang terlibat dalam implementasi program untuk memahami persepsi dan dampak BLT (Achidsti, Kafa, Hudani 2021)
- b) Observasi : Observasi adalah teknik pengumpulan data Dimana peneliti mengadakan pengamatan, baik secara langsung maupun tidak langsung tentang hal – hal yang diamati dan mencatatnya pada alat observasi. Peneliti melakukan observasi langsung terkait kondisi sosial-ekonomi penerima manfaat, serta pelaksanaan program di lapangan (Ahsanulkhq 2019)
- c) Studi Dokumentasi : Dokumentasi asal katanya dari dokumen artinya barang – barang tertulis, didalam penerapannya, peneliti memeriksa benda – benda tertulis contohnya buku – buku, majalah, dokumen, peraturan – peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan lain lain. Penelitian ini sangat memerlukan dokumen-dokumen resmi. Dokumen yang dimaksud seperti laporan pemerintah, data statistik tentang kemiskinan, dan laporan pelaksanaan BLT (Pramesti & Mardhatillah 2023).

Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu data yang harus segera dianalisis setelah dikumpulkan dan dalam bentuk laporan lapangan. Beberapa tahap, yaitu : Mereduksi data (Data Reducation), Menyajikan data (Data Display), Membuat Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) (Putera & Harsono 2022). Pada hakikatnya analisis data adalah sebuah kegiatan untuk memberikan makna atau memaknai data dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya menjadi bagian-bagian berdasarkan pengelompokan tertentu sehingga diperoleh suatu temuan terhadap rumusan masalah yang diajukan (Assyakurrohim, Ikhrum, Sirodi & Afgani 2023). Pelaksanaan analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dengan mengorganisasikan, menjabarkan, mensintesis, menyusun pola, memilih mana yang penting, dan menarik kesimpulan terhadap data lapangan (Waruwu 2023).

- a) Analisis Kualitatif : Analisis dilakukan sepanjang berlangsungnya penelitian dan dilakukan secara terus menerus (sirkuler) dari awal sampai akhir penelitian. Dalam melakukan kegiatan tersebut dilaksanakan berbagai tindakan, tidak saja penggalian data yang insentif, tetapi disertai dengan kategorisasi data, penyusunan proposisi yang kesemuanya itu mendasarkan diri pada perolehan data di lapangan. Data dari wawancara dan observasi dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik untuk menemukan pola dan tema utama yang terkait dengan efektivitas program BLT (Redana & Suprpta 2022).
- b) Analisis Kuantitatif: Analisis kuantitatif yang umumnya digunakan adalah analisis statistik. Secara umum, analisis ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: 1. Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau mendeskripsikan data yang terkumpul begitu saja, tanpa membuat Kesimpulan umum atau generalisasi. Analisis ini hanya pengumpulan data dasar berupa deskripsi belaka karena tidak mencari atau menjelaskan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi, atau menarik kesimpulan. 2. Statistik inferensial adalah statistik deskriptif yang hanya mewakili data. Oleh karena itu, statistik inferensial berusaha menarik kesimpulan dan keputusan berdasarkan analisis yang dilakukan. Biasanya, analisis ini melibatkan pengambilan sampel tertentu dari populasi besar dan menerapkan hasil analisis sampel ke populasi. Oleh karena itu, statistik inferensial disebut juga sebagai statistik induktif. Dengan untuk melihat hubungan antara BLT dan tingkat kemiskinan (Febriani, Arobiah, Apriyani, Ramdhani & Millah 2023).
- c) Triangulasi Data : Triangulasi data mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data, wajib menggunakan beragam sumber data yang berbeda – beda yang tersedia. Menggabungkan data dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dokumentasi) untuk meningkatkan validitas hasil penelitian (Sasmita 2020).

Kriteria Validitas dan Reliabilitas

Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrument pengukur (tes) dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Artinya hasil ukur dari pengukuran tersebut merupakan besaran yang menerminkan secara tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur (Matondang 2009). Atau validitas bisa diperoleh melalui triangulasi data dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi temuan. Reliabilitas berasal dari kata *reliability* berarti sejauh mana hasil suatu penguuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relative sama, dan juga pula dipertahankan dengan menggunakan instrumen penelitian yang teruji dan prosedur pengumpulan data yang konsisten (Matondang 2009). Validitas dan reliabilitas data suatu penelitian merupakan suatu syarat yang harus dilakukan untuk menilai kualitas suatu hasil penelitian (Afiyanti 2008).

Batasan Penelitian

Batasan atau ruang lingkup penelitian perlu dilakukan agar penelitian dapat terarah dengan baik dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan (Wanto & Windarto 2017). Adapun Batasan atau ruang lingkup penelitian ini hanya mencakup daerah pedesaan di beberapa wilayah tertentu, sehingga hasil penelitian mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi untuk seluruh Indonesia. Faktor-faktor luar yang tidak terkontrol, seperti kondisi ekonomi makro, dapat mempengaruhi hasil temuan terkait efektivitas BLT (Wanto & Windarto 2017).

Uji Kelayakan Model

- a) Uji hipotesis dilakukan untuk menilai tingkat signifikansi koefisien regresi berdasarkan hasil estimasi model. Proses ini mencakup dua jenis pengujian: yang pertama Uji signifikansi parameter individual atau uji statistik t, yang bertujuan mengukur pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dan yang kedua uji signifikansi simultan atau uji statistik F, yang mengevaluasi pengaruh kolektif variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat kesalahan α . Dalam hal ini, uji statistik t menyoroti pengaruh individu variabel independen terhadap variasi variabel dependen, sementara uji statistik F memastikan pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan
- b) Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana model mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara nol hingga satu; R^2 bernilai nol menunjukkan bahwa variasi variabel dependen tidak dijelaskan oleh variabel independen sama sekali, sedangkan R^2 bernilai satu menandakan bahwa variasi variabel dependen sepenuhnya

dijelaskan oleh variabel independen. Penelitian ini menggunakan Adjusted R^2 untuk memberikan hasil yang lebih akurat, mengingat R^2 cenderung bias terhadap penambahan variabel independen.

Berdasarkan uji statistik t terhadap variabel LnBLTDD dan DM yang ditunjukkan pada Tabel 1, nilai probabilitas yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut signifikan.

Tabel 1. Uji Kelayakan Model

No	Uji	Variabel	Prob	Hasil
1	Uji	LnBLTDD	0.04	Signifikan
2	Statistik t	DM	0.00	Signifikan
3	Adj. R^2		0.999445	

Pengaruh signifikan terhadap variabel JPMDD

Selanjutnya, nilai *Adjusted* R^2 bernilai 0,999445, menjelaskan kemampuan variabel independen BLTDD dan DM dalam menjelaskan varians dari variabel dependen JPMDD sebesar 99,94%. Dari dua indikator tersebut, model *fixed effect* layak digunakan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

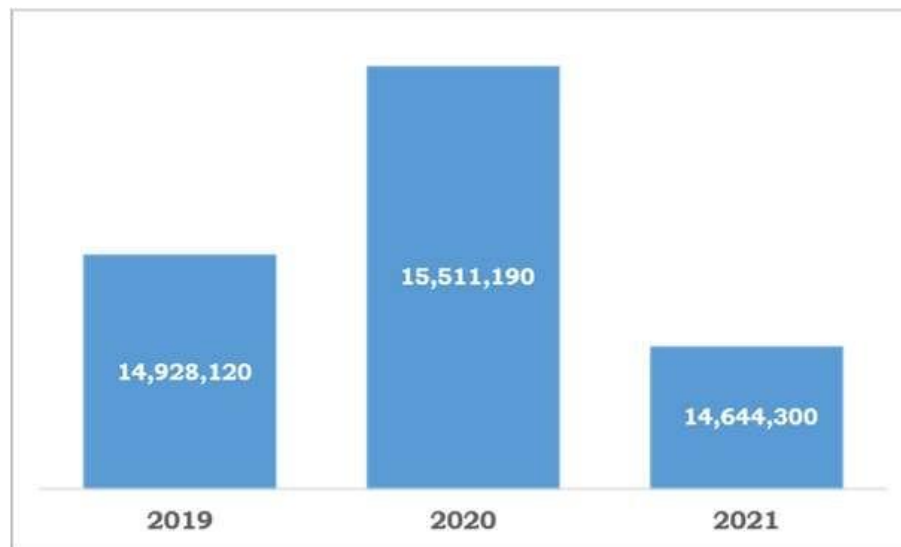
Hasil Penelitian

a) Profil Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Sebagian besar penerima BLT adalah rumah tangga dengan pendapatan rendah, pekerja informal, dan petani kecil. Tingkat pendidikan dan keterampilan penerima BLT di pedesaan cenderung rendah, yang mempengaruhi akses mereka terhadap peluang ekonomi lain (Sofi 2021).

b) Data Jumlah Penduduk Miskin

BLT membantu meningkatkan daya beli masyarakat miskin, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Meskipun demikian, dampaknya lebih bersifat sementara dan terbatas pada periode saat bantuan diberikan. Hasil survei menunjukkan adanya peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar 10-20% selama periode penerimaan BLT (Dewi, Andrianus 2021). Mengacu pada rilis Badan Pusat Statistik (BPS), dapat dilihat pada Grafuk 1, penduduk miskin pedesaan tahun 2020 berjumlah 15,51 juta jiwa, meningkat tahun 2019. Namun pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin pedesaan Indonesia berkurang 866,89 ribu jiwa menjadi 14,64 juta jiwa. Penurunan jumlah miskin pedesaan itu mengindikasikan bahwa berbagai Upaya pemerintah melalui (Otheliansyah, Hijwar 2023).



Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan 2019 s.d 2021

c) Efektivitas BLT dalam Mengurangi Kemiskinan

BLT berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan sementara di desa – desa yang diteliti, dengan pengurangan kemiskinan rata – rata sebesar 5-10%. Namun, hasil ini belum mampu secara signifikan mengurangi kemiskinan struktural jangka panjang karena program ini lebih berfokus pada bantuan konsumtif, bukan pengembangan kemandirian ekonomi. Kondisi Masih tingginya jumlah penduduk miskin desa, mengindikasikan belum terwujudnya kesejahteraan di desa. Jumlah penduduk miskin pedesaan pada 33 provinsi pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 866.839 jiwa atau turun 5,59% dibandingkan tahun 2020 yang dapat dilihat pada Tabel 2 (Otheliansyah, Hijwar 2023)

Tabel 2. Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan di 33 Provinsi

Provinsi	Kemiskinan		Perubahan
	2020	2021	
Aceh	649,020	654,790	-0.89%
Sumut	600,480	548,030	8.73%
Sumbar	223,470	205,390	8.09%
Riau	312,760	305,670	2.27%
Jambi	155,500	153,750	1.13%
Sumsel	715,220	723,230	-1.12%
Bengkulu	206,600	192,970	6.60%
Lampung	831,860	770,540	7.37%
Babel	43,670	42,430	2.84%
Kep. Riau	20,790	18,440	11.30%
Jabar	1,183,570	1,053,790	10.97%
Jateng	2,229,440	2,086,920	6.39%
DIY	149,930	142,780	4.77%
Jatim	2,765,840	2,490,690	9.95%
Banten	317,490	275,660	13.18%
Bali	71,440	73,860	-3.39%

Kemiskinan			
Provinsi	2020	2021	Perubahan
NTB	356,440	347,640	2.47%
NTT	1,054,650	1,025,700	2.74%
Kalbar	281,610	264,960	5.91%
Kalteng	87,450	83,170	4.89%
Kalsel	128,080	117,410	8.33%
Kaltim	115,880	111,850	3.48%
Kaltara	27,540	25,610	7.01%
Sulut	124,190	116,410	6.26%
Sulteng	316,310	294,540	6.88%
Sulsel	605,160	566,620	6.37%
Sultra	244,100	252,250	-3.34%
Gorontalo	163,760	163,090	0.41%
Sulbar	130,910	138,270	-5.62%
Maluku	272,530	245,940	9.76%
Malut	69,520	63,580	8.54%
Pap. Barat	188,470	193,100	-2.46%
Papua	867,500	895,260	-3.20%

sumber: BPS (2020-2021)

d) Penyaluran Program BLT DD

Penyaluran BLT DD merupakan upaya mempertahankan tingkat konsumsi KPM sebagai dampak pandemi. Secara umum, jumlah penyalursn BLT DD di 33 provinsi pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp4,71 triliun atau 20,67% dibandingkan tahun 2020 yang dapat dilihat pada tabel 3.

Peningkatan penyaluran BLT DD tertinggi terdapat pada Provinsi Bali sebesar Rp217 miliar (98,53%). Sedangkan penurunan penyaluran BLT DD terbanyak terdapat pada Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp416 miliar (-28,14%). Jika dikonversi menjadi jumlah KPM, maka terdapat 1.787.918 KPM yang belum mendapatkan BLT (Otheliansyah, Hizwar 2023).

Tabel 3. Penyaluran BLT DD di 33 Provinsi

BLT Dana Desa			
Provinsi	2020	2021	Perubahan
Aceh	1,153,161,000,000	2,218,557,054,321	92.39%
Sumut	1,250,904,300,000	1,718,642,972,800	37.39%
Sumbar	379,923,300,000	383,722,704,000	1.00%
Riau	504,114,000,000	638,511,300,074	26.66%
Jambi	504,114,000,000	638,511,300,074	26.66%
Sumsel	904,038,900,000	1,076,042,052,100	19.03%
Bengkulu	252,638,100,000	358,532,700,000	41.92%
Lampung	752,786,700,000	676,203,483,200	-10.17%
Babel	119,700,900,000	198,538,800,000	65.86%
Kep. Riau	82,497,900,000	121,191,600,000	46.90%
Jabar	2,464,011,000,000	2,880,742,692,464	16.91%
Jateng	3,223,499,400,000	2,316,562,709,720	-28.14%
DIY	164,384,700,000	152,197,500,400	-7.41%

BLT Dana Desa			
Provinsi	2020	2021	Perubahan
Jatim	2,609,590,200,000	2,854,548,105,961	9.39%
Banten	480,740,700,000	593,509,970,000	23.46%
Bali	220,605,000,000	437,968,300,000	98.53%
NTB	516,355,200,000	499,373,300,000	-3.29%
NTT	982,495,200,000	1,348,764,872,500	37.28%
Kalbar	545,056,200,000	693,640,693,530	27.26%
Kalteng	353,394,300,000	431,460,580,000	22.09%
Kalsel	441,041,700,000	831,897,775,001	88.62%
Kaltim	441,041,700,000	831,897,775,001	88.62%
Kaltara	66,318,300,000	119,979,400,000	80.91%
Sulut	349,072,500,000	485,932,150,000	39.21%
Sulteng	474,991,500,000	506,923,486,051	6.72%
Sulsel	768,664,500,000	928,398,444,241	20.78%
Sultra	456,919,200,000	443,030,250,001	-3.04%
Gorontalo	204,695,100,000	228,112,605,640	11.44%
Sulbar	224,174,700,000	256,713,600,000	14.51%
Maluku	280,728,900,000	401,352,096,999	42.97%
Malut	201,727,800,000	295,955,000,000	46.71%
Pap. Barat	273,115,500,000	516,431,150,000	89.09%
Papua	1,479,200,100,000	2,292,853,712,643	55.01%

sumber: BPS, (2020-2021)

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya disebabkan kondisi mereka yang terdampak bukan hanya dari segi pembatasan sosial tapi faktor ekonomi dengan pekerjaan yang tidak tetap dan penghasilan yang tidak menentu sehingga mereka sangat senang dengan adanya bantuan tersebut. Masyarakat penerima BLT berharap agar pemerintah memperhatikan kondisi mereka dan melanjutkan program tersebut guna membantu mereka dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya (Mustafa et al 2022).

Pengukuran efektivitas pengalokasikan dana desa pada penyaluran bantuan langsung tunai yaitu menggunakan hasil dari kuesioner yang telah disebarkan kepada keluarga penerima manfaat BLT. Setiap indikator atau pertanyaan dalam kuesioner mengacu pada aspek-aspek tertentu dari program VLT, seperti dampaknya terhadap daya beli, ketepatan sasaran, penggunaan dana, ketergantungan penerima, dan efektivitas program.

Tabel 4. Kuesioner dengan Skala Likert untuk Penilaian Efektivitas Program BLT

No	Indikator	Pernyataan	Skala Likert
1	Dampak BLT pada Daya Beli	Seberapa besar bantuan BLT membantu Anda dalam memenuhi kebutuhan pokok?	1: Sangat Tidak Setuju - 5: Sangat Setuju

No	Indikator	Pernyataan	Skala Likert
2	Ketepatan Sasaran	Apakah Anda merasa bantuan BLT diberikan kepada orang yang membutuhkan?	1: Sangat Tidak Setuju - 5: Sangat Setuju
3	Penggunaan Dana BLT untuk Kebutuhan Dasar	Apakah dana BLT digunakan untuk memnuhi kebutuhan dasar keluarga (seperti pangan kesehatan)?	1: Sangat Tidak Setuju - 5: Sangat Setuju
4	Dampak BLT terhadap Pendidikan	Apakah BLT membantu anak Anda untuk tetap melanjutkan pendidikan?	1: Sangat Tidak Setuju - 5: Sangat Setuju
5	Persepsi tentang Ketergantungan pada BLT	Apakah Anda merasa ketergantungan BLT akan mengurangi motivasi untuk mencari pendapatan lain?	1: Sangat Tidak Setuju - 5: Sangat Setuju
6	Kesiapan untuk Program Pemberdayaan Ekonomi Lanjutan	Apakah Anda berharap ada program yang mendukung kemandirian ekonomi setelah menerima BLT?	1: Sangat Tidak Setuju - 5: Sangat Setuju
7	Tingkat Kepercayaan terhadap Proses Penyaluran BLT	Seberapa besar Anda mempecayai proses penyaluran BLT di desa Anda?	1: Sangat Tidak Setuju - 5: Sangat Setuju
8	Efektivitas BLT dalam Mengurangi Kemiskinan	Seberapa efektif BLT menurut Anda dalam mengurangi tingkat kemiskinan di desa Anda?	1: Sangat Tidak Setuju - 5: Sangat Setuju
9	Keberlanjutan Dampak BLT	Apakah Anda merasa dampak BLT bersifat jangka panjang atau hanya sementara?	1: Sangat Tidak Setuju - 5: Sangat Setuju
10	Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penyaluran BLT	Apakah masyarakat terlibat aktif dalam proses penyaluran BLT?	1: Sangat Tidak Setuju - 5: Sangat Setuju

Tabel di bawah ini menunjukkan hasil pengisian kuesioner oleh responden menilai program BLT.

Tabel 5. Hasil Jumlah Skala Likert Responden Terhadap Program BLT

NO	Responden	Skor Pertanyaan										Total Skor
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Responden 1	4	5	4	3	4	5	4	3	5	4	42
2	Responden 2	3	3	5	4	3	4	4	4	5	4	39
3	Responden 3	5	5	4	5	5	4	3	4	5	5	49
4	Responden 4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	43
5	Responden 5	3	4	3	4	4	5	5	3	4	5	40

PEMBAHASAN

a) Tingkat Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran dalam penelitian ini adalah efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek sasaran, artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat sasaran dalam program atau kebijakan dari pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaktepatan sasaran penerima BLT, dimana beberapa penerima bukan dari kelompok yang paling membutuhkan, sementara ada masyarakat miskin yang belum menerima bantuan. Sekitar 15% dari penerima BLT mengaku tidak sepenuhnya masuk dalam kategori miskin, yang menunjukkan kelemahan dalam pendataan dan distribusi. Hal ini terjadi karena kesalahan dalam penetapan sasaran dan ketidaktercakupkan penerima bantuan langsung tunai dana desa sera verifikasi tidak berjalan dengan semestinya hanya dengan melakukan musyawarah khusus kepala desa, perangkat dan BPD tanpa melibatkan masyarakat (Lihardi, RFS 2021).

b) Kendala dalam Pelaksanaan Program

- Terjadi sedikit kendala dalam pendataan dikarenakan sifat bantuan yang regulasinya dikeluarkan secara mendadak dan harus terpenuhi dalam waktu yang cepat untuk menanggulangi dampaknya. Pendataan yang kurang akurat sehingga banyak desa melaporkan bahwa data penerima BLT kurang diperbarui, terjadi penyaluran bantuan yang tidak tepat (Ananda 2021).
- Ketergantungan masyarakat pada BLT di beberapa wilayah, masyarakat menjadi tergantung pada BLT dan kurang terdorong untuk mencari alternatif pendapatan lain. Mereka cenderung mengandalkan bantuan tanpa berupaya meningkatkan kapasitas ekonomi. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan pendampingan ekonomi yang berkelanjutan. (Sabrina et al 2024)

c) Persepsi Masyarakat terhadap Program BLT

Persepsi masyarakat adalah cara pandang sekelompok manusia hidup bersama dalam suatu lingkungan tertentu yang sama dalam memberikan kesimpulan dalam suatu obyek berdasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pengamatan sehingga masyarakat satu dengan yang lain menghasilkan pendapat yang berbeda walaupun obyeknya sama (Wahyuningsih et al., 2021). Masyarakat umumnya menyambut baik program BLT, karena membantu mereka dalam situasi ekonomi sulit sehingga dapat memberi manfaat dalam memenuhi kebutuhan pokok (Reptiana et al., 2022). Namun, sebagian masyarakat menyatakan bahwa bantuan ini hanya solusi jangka pendek dan tidak membantu mengatasi masalah kemiskinan jangka panjang. Sekitar 40% penerima berharap ada program lanjutan yang lebih berfokus pada pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar bantuan tunai.

d) Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Adapun dasar Hukum penetapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu berdasarkan :

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) di seluruh Indonesia.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (poorest), Rumah Tangga Miskin (poor) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (near poor) di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan dikeluarkannya Instruksi. Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, maka Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin dinyatakan tidak berlaku lagi. Untuk kelancaran pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran yang meliputi rumah tangga sangat miskin, rumah tangga miskin dan rumah tangga hampir miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) (Tumbel, Kiyai & MAMBO 2021).

e) Perubahan Sosial dan Ekonomi yang Terjadi

Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga – lembaga kemasyarakatan dalam suatu kehidupan masyarakat, yaitu berubahnya sistem sosial nilai – nilai, serta interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. BLT berkontribusi dalam meningkatkan stabilitas sosial di desa dengan mengurangi ketegangan ekonomi pada saat krisis, seperti pandemi. Namun, tidak ada perubahan signifikan dalam peningkatan keterampilan atau akses terhadap lapangan kerja baru bagi penerima BLT (Sanaba, Lasut & Lesawengen 2023). Bantuan Langsung Tunai (BLT) sering kali belum berhasil mengurangi kemiskinan struktural karena ada beberapa alasan yang mendasar yaitu:

- Sifat BLT yang Sementara dan Tidak Berkelanjutan
BLT dirancang sebagai bantuan langsung, bukan sebagai solusi permanen untuk memberdayakan masyarakat keluar dari kemiskinan. Bantuan ini hanya memenuhi dasar sementara, tetapi tidak memberikan modal atau kapasitas untuk menciptakan perubahan jangka panjang dalam kehidupan penerima manfaat.
- Tidak Menyentuh Akar Permasalahan Kemiskinan Struktural
Kemiskinan Struktural disebabkan oleh ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan infrastruktur. BLT tidak dirancang untuk memperbaiki ketimpangan ini secara sistemik. Contohnya penduduk miskin sering kali terjebak dalam lingkaran kemiskinan karena kurangnya akses pendidikan atau keterampilan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

f) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas BLT

Efektivitas program sangat dipengaruhi oleh kualitas data penerima, mekanisme penyaluran yang transparan, dan pemantauan yang baik. Desa dengan kapasitas pemerintahan yang lebih baik cenderung mampu mengelola BLT dengan lebih efektif, sementara desa dengan kelemahan administratif mengalami berbagai masalah dalam penyaluran. Faktor – faktornya yaitu Pengetahuan masyarakat terhadap program masih kurang, sumber informasi yang diberikan masih ada yang kurang di beberapa desa, penentuan kriteria penerima program BLT belum tepat sasaran, tidak sesuainya program BLT dengan kebutuhan masyarakat, waktu pembagian dana BLT masih belum jelas, perubahan kondisi sosial masyarakat tidak signifikan dan perubahan kondisi ekonomi masyarakat tidak signifikan (Baihaqi 2024).

Refleksi mengenai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas BLT penting untuk memahami mengapa program ini tidak selalu memberikan dampak optimal. Beberapa faktor eksternal yang signifikan yaitu:

- Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat
Ketergantungan pada sektor informal, banyak penerima BLT di pedesaan atau wilayah miskin bergantung pada pekerjaan informal yang rentan terhadap krisis ekonomi. BLT sering kali hanya digunakan untuk kebutuhan dasar tanpa menciptakan perubahan ekonomi jangka panjang.
- Peningkatan Infrastruktur
Mempercepat pembangunan jalan, listrik, dan pasar untuk mendukung aktivitas ekonomu masyarakat miskin.
- Sistem Distribusi dan Administrasi
Ketidakakuratan data, data penerima bantuan yang tidak mutakhir atau tidak valid dapat menyebabkan salah sasaran, sehingga bantuan tidak menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, transparansi dan akuntabilitas, jika ada kebocoran dana atau distribusi yang tidak adil, efektivitas BLT dalam mengurangi kemiskinan akan berkurang.

g) Dampak dari Program BLT

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil (Hendri 2021)

- Dampak Positif

Dampak positif yang diharapkan setelah diterapkan suatu kebijakan merupakan konsekuensi yang memang diharapkan dari implementasi suatu kebijakan. Begitu pula dengan implementasi kebijakan BLT Dana Desa kepada keluarga miskin tentunya berdampak positif terhadap kehidupan keluarga miskin yang terhimpit secara ekonomi akibat pandemi Covid-19. Bantuan tersebut bisa digunakan untuk meringankan beban kehidupan ekonomi keluarga miskin tersebut. Bahkan ada yang memanfaatkan bantuan uang tersebut untuk modal usaha kecil-kecilan. Hal tersebut memang dampak yang diharapkan dari diterapkannya sebuah kebijakan (Redana & Saputra 2022).

- Dampak Negatif

Selanjutnya dalam setiap implementasi kebijakan akan selalu muncul dampak negatif dari kebijakan tersebut. Dampak negatif ini sebenarnya tidak diharapkan oleh pemerintah tetapi merupakan sebuah hal yang memang akan sangat sulit untuk dihindari.

Dimensi dampak kebijakan publik salah satunya adalah dampak yang tidak diharapkan (*unintended consequences*), yaitu sebagian masyarakat enggan berusaha keras memperoleh lapangan pekerjaan karena senang menunggu subsidi dari pemerintah.

Untuk itulah pemerintah dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan pemberian BLT-Dana Desa hendaknya berusaha semaksimal mungkin menyampaikan kepada masyarakat, khususnya keluarga miskin penerima bantuan supaya bisa memanfaatkan bantuan tersebut untuk membantu meringankan beban kehidupan keluarganya. Jangan menggunakan uang bantuan tersebut untuk hal-hal yang tidak perlu. Atau bahkan aparat pemerintah bisa saja mengancam akan memberikan sanksi memutus bantuan tersebut atau tidak akan diberikan bantuan lagi jika ada masyarakat yang ketahuan menggunakan uang bantuan itu tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah. Apalagi dipergunakan untuk hal-hal yang negatif, seperti untuk membeli rokok, membeli minuman keras, berjudi dan hal-hal negatif lainnya.

h) Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan BLT

Peran adalah suatu tindak tingkah laku dari seseorang terhadap suatu keadaan ataupun kondisi yang dimana menjadi suatu tanda sikap seseorang ataupun sekelompok orang dalam mengatasi beberapa masalah yang ada. Peran dari seseorang mampu menampilkan suatu hal dari dalam diri seseorang ataupun kelompok tersebut, baik dari berbicara, melihat, bertindak ataupun hal yang lainnya (Syavira, Fadhila & MEI 2021). Desa dengan kapasitas pemerintahan yang lebih baik menunjukkan kinerja yang lebih efektif dalam penyaluran BLT. Pemerintah daerah yang aktif dalam mengawasi program dapat meningkatkan akurasi pendataan, distribusi, dan pemantauan pelaksanaan program. Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan program di tingkat lokal.

KESIMPULAN

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia telah memberikan dampak positif dalam mengurangi angka kemiskinan pedesaan secara sementara, tetapi tidak cukup efektif dalam mengatasi kemiskinan struktural jangka panjang. Meskipun program ini meningkatkan daya beli masyarakat miskin, terdapat masalah seperti ketergantungan pada subsidi dan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi bagi penerima bantuan dan peran aktif pemerintah daerah dalam pengawasan dan pelaksanaan program agar lebih efektif.

Dampak program BLT Dana Desa, menyoroti dampak positif dan negatif bagi para penerima, dan menekankan perlunya penggunaan bantuan secara bertanggung jawab. Peran pemerintah daerah dalam melaksanakan program BLT secara efektif, dan menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan dengan baik.

Data spesifik tentang distribusi BLT Dana Desa di 33 provinsi, yang menunjukkan peningkatan dan penurunan alokasi dana yang signifikan, dengan fokus pada jumlah rumah tangga yang belum menerima bantuan. Peningkatan keseluruhan distribusi BLT Dana Desa pada 2021 dibandingkan dengan 2020, dengan angka-angka rinci untuk provinsi-provinsi tertentu, yang menyoroti peningkatan tertinggi di Bali dan penurunan terbesar di Jawa Tengah. Data statistik tentang kinerja ekonomi daerah-daerah tertentu, seperti Jawa Barat dan Papua, yang memberikan gambaran tentang persentase perubahannya

Program BLT memiliki tujuan utama untuk mengurangi tingkat kemiskinan di daerah pedesaan dengan memberikan bantuan finansial kepada keluarga miskin. Penelitian menunjukkan bahwa program ini dapat memberikan dampak positif, seperti meringankan beban ekonomi keluarga dan memberikan modal untuk usaha kecil.

Meskipun program ini memiliki potensi yang baik, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Misalnya, pendataan yang kurang akurat dan ketergantungan masyarakat pada bantuan, yang dapat menghambat upaya untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mereka.

Untuk meningkatkan efektivitas program BLT, disarankan agar ada kebijakan pendampingan ekonomi yang berkelanjutan dan perbaikan dalam sistem pendataan penerima bantuan. Hal ini penting agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dapat mendorong masyarakat untuk mencari alternatif pendapatan.

Agar program Bantuan Langsung Tunai (BLT) lebih efektif dalam jangka panjang, pemerintah dapat mengadopsi kebijakan yang berfokus pada penguatan struktur ekonomi masyarakat miskin, perbaikan mekanisme distribusi, dan integrasi program BLT dengan strategi pemberdayaan. Berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan:

- a) Mengintegrasikan BLT dengan Program Pemberdayaan Ekonomi, menghubungkan penerimaan BLT dengan program pelatihan keterampilan, akses kredit mikro, atau insentif usaha kecil untuk mendorong kemandirian ekonomi. Memberikan pelatihan sederhana tentang pengelolaan

keuangan rumah tangga agar dana BLT digunakan secara lebih produktif, seperti untuk investasi dalam pendidikan atau usaha dengan pelatihan dan edukasi keuangan. Serta menghubungkan penerima BLT dengan pasar lokal melalui pembangunan infrastruktur pendukung (jalan, internet, dan lain-lain) untuk meningkatkan peluang ekonomi.

- b) Mengembangkan BLT Bersyarat (Conditional Cash Transfers). Insentif berbasis kinerja mengaitkan BLT dengan perilaku tertentu, seperti memastikan anak-anak penerima bantuan tetap sekolah atau keluarga rutin memeriksakan kesehatan. Mengintegrasikan BLT dengan tujuan sosial lainnya, seperti mendorong vaksinasi anak, kunjungan ke posyandu, atau keikutsertaan dalam pelatihan keterampilan.

Kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah salah satunya adalah Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang menjadi dasar hukum dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin desa. Kebijakan penyaluran BLT Dana Desa disalurkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah dan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada korban COVID-19, khususnya di pedesaan. Kebijakan dari Menteri Desa tersebut yang utamakan dalam penggunaan Dana Desa terkait bantuan penanganan COVID-19. Pemerintah melakukan kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam upaya meningkatkan pemulihan ekonomi masyarakat di tingkat Desa (Rahayuningsih 2021).

Strategi pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dengan program BLT dapat menciptakan dampak jangka panjang yang signifikan. Fokusnya adalah :

- a) Mengarahkan BLT ke penggunaan produktif.
- b) Membekali penerima dengan keterampilan dan akses modal.
- c) Menghubungkan penerima dengan peluang ekonomi lokal dan nasional.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang dampak BLT terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan dan menjadi masukan bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki desain program bantuan sosial di masa mendatang.

Dengan demikian, meskipun Program BLT memiliki dampak positif, perlu adanya perhatian lebih terhadap kendala yang ada dan upaya untuk meningkatkan efektivitas program agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pengentasan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achidsti, A., Kafa, M. Z., & Hudani, A. M. (2021). Tata Kelola Pendapatan dan Penyaluran BLT-DD Melalui *Pasardesa.id* sebagai Upaya Pencegahan Korupsi. *Intergrasi : Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 313-326. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2:681>

- Ade, T. (2022). PERAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DALAM MEMANTU PEREKONOMIAN MASYARAKAT DEDA TANJUNG PAUH MUSDIK PADA MASA PANDEMI TAHUN 2022. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(10), 2575-2484.
- Afiyanti, Y. (2008). Validitas dan Reliabilitas Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(2), 137-141. <https://doi.org/10.7454/jki.v12i2.212>
- Ahsanulhaq, M. (2019). Membentuk Karakter Religius Peserta Didik Melalui Metode Pembiasaan. *Jurnal Prakasa Paedagogia*, 2 (1). 21-33. <https://doi.org/10.24176/jpp.v2i1.4312>
- Aji, B. S. (2010). Evaluasi Dampak Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Tentang Evaluasi Dampak Program BLT terhadap Rumah Tangga Sasaran). Malang: Universitas Brawijaya.
- Akib, I., & Risfaisal. (2015). Bantuan Langsung Tunai. *Equilibrium : Jurnal Pendidikan*, 3(2), 126-135. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v3i2.283>
- Al Izzati, R., Suryadarma, D., & Suryahadi, A (2020). The Behavioral Effects of Unconditional Cash.
- Ananda R. (2021). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah (Doctoral dissertation, IPDN Jatinangor). <https://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/6276>
- Aseh, S., Gafar, T. F., & Zamhasari, Z. (2021). Problematika Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun 2020. *JOELS:Journal of Election and Leadership*, 2(1), 30-40. <https://doi.org/10.31849/joels.v2i1.7661>
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1-9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1952>
- Baihaqi, A. (2024). EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA CANGKERING KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA. *Al lidara Balad*, 5(3), 36-43 <https://doi.org/10.36658/aliidarabalad.5.3259>
- Dewi, R. & Andrianus, H., F (2021) ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA PERIODE 2005-2015. 15(2). 77-84. <https://doi.org/10.31869/mi.v15i2.2408>
- Febriani, E. S., Arobiah, D., Apriyani, A., Ramdhani, E., & Millah, A. S. (2023). Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas. *Jurnal Kreatifitas Mahasiswa*, 1(2), 140-153. <https://riset-iaid.net/index.php/jpm/article/view/1447>.
- Hasyim, Prastyawan A, & Haryono, D. (2024). Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kecamatan Sembakung. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(8), 4163. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i8.4359>

- Lihardi, M. I., & RFS, H. T. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Teratak Jering Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Skingingi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3),-7533. <https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2195>
- Matondang, Zulkifli (2009). VALIDITAS DAN RELIABILITAS SUATU INSTRUMEN PENELITIAN. *Jurnal Tabularasa*, 6(1). pp. 87-97. ISSN 1693-7731. <https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/705>
- Mustafa, M., Nurjaya, M., Rahmawati, R., Tanggerang, T., & Bakti, A. (2022). Alokasi Dana Desa dalam Penanggulangan Dampak Covid-19 di Desa Majannang Kabupaten Maros. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(1), 141-150.
- Otheliansyah, G., & Hizwar, R. (2023). Pengaruh Bantuan Langsung Tunai Dan Desa dan Kemandirian Desa di Masa Pandemi terhadap Kemiskinan Desa di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(2), 94-105. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/jmp.v4i2.409>
- Pramesti, A. A., & Mardhatillah, Y. (2023). Efektivitas Aplikasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dalam Pelayanan Informasi Oublik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 5 (1), 62-86. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP>
- Putera, M. N. S., & Harsono, D. D. (2022). Efektivitas LAPOR! dalam Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintah*, 4(2), 90-105. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP>
- Redana, D. N., & Suprpta, I. N. (2022). Evaluasi Program Blt-Dana Desa Kepada Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. *Locus*, 14(1), 94-110 <https://doi.org/10.37637/locus.v14i1.930>
- Reptiana, R. P., Widianoro, D. ., Sari, W. D. ., Desvianti, E. ., & Arezah, E. (2022). Persepsu Masyarakat terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Islamic and Contemporary Psychology*, 1(2), 105-110. <https://doi.org/10.25299/jicop.v1i2.8793>
- Sabrina, L. ., Faqih, A. ., Ayuadela, C. ., Adim Fadilah, I. N. ., Fiyana, R. ., Kyla Ananta, M. R. ., & Dewi, R. (2024). Analisis Persepsi Masyarakat Tentang Program BLT di Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(1), 306-317. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2377>
- Sanaba, M. R., Lasut, J. J., & Lesawengen, L. (2023). Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Wabah Covid 19 Di Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Ilmiah Society*, 3(3).

- Sasmita, R. S. (2020). PEMANFAATAN INTERNET SEBAGAI SUMBER BELAJAR. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 2(1), 99-103. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v2i1.603>
- Sihura, H. K. (2021). Analisis Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Dalam Menunjang Perekonomian Akibat Covid 19 (Studi Kasus Masyarakat Desa Hilizihoni, Kecamatan Fanayama, Nias Selatan). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(4), 1313-1316. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i4.859>
- Sofi, I. (2021). EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DALAM PEMULIHAN EKONOMI DI DESA. *Indonesia Treasury Dan Kebijakan Publik*, 6(3); 247-262. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i3.280>
- Syavira, R., Fadhila Rahma, T. I., & MEI, M. (2021). Perananan Pemerintag Kecamatan Tigapanah dalam Program Bantuan Langsung Tunai terhadap Pandemi Covid-19 di Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun 2020, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9111-9121. <https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2429>
- Tumbel, R., Kiyai, B., & MAMBO, R. (2021). Dampak kebijakan program bantuan langsung tunai dengan kondisi ekonomi masyarakat di kelurahan talikuran kecamatan kawangkoan utara kabupaten minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(110).
- Wahyuningsih, S., Yulianti, R., & Berthanilla, R. (2021). Effect of e-Government on Improving the Quality of Public Services in Serang Municipality. *Sawala: Jurnal Administasi Negara*, 9(2), 213-233. <https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.4035>
- Wanto, A., & Windarto, A. P. (2017). Analisis Prediksi Indeks Harga Konsumen Berdasarkan Kelompok Kesehatan Dengan Menggunakan Metode Backpropagation. *Sinkron : Jurnal Dan Penelitian Teknik Informatikan*. 2(1). 37-43. Retrieved from <https://www.jurnal.polgan.ac.id/index.php/sinkron/article/view/76>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Journal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896-2910. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>
- Yohandarwati, Rosalin, L. N., Sugihanretha, I. D. G., Sanjoyo, Kiswanti, U., Pawoko, G., Puspasari, S., & Fithriyah. (2003). *Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial (Suatu kajian awal)*. Jakarta: Bappenas.